FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA MASYARAKAT PESISIR DI KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar SarjanaPendidikan Geografi

Oleh:
Hamzulida Rizqia Rahmatika
3201411097

JURUSAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Januari 2016

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dr. Tjaturahono B. S., M.Si.	Drs. Hariyanto, M.Si.
NIP.196210191988031002	NIP.196203151989011001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Geografi

Dr. Tjaturahono Budi Sanjoto, M.Si.

NIP. 196210191988031002

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 18 Januari 2016

Penguji Utama

Drs. Moch. Arifien, M.Si.
NIP. 195508261983031003

Penguji I

Drs. Hariyanto, M.Si.
NIP.196203151989011001

Penguji II

Dr. Tjaturahono B. S., M.Si.
NIP.196210191988031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.
NIP. 196308021988031001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 15 Januari 2016

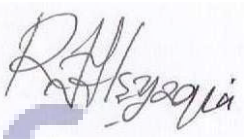

Hamzulida Rizqia Rahmatika
NIM. 3201411097

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. (Aristoteles)
2. Orang-orang hebat dibidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi. (Ernest Newman)
3. Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak. (Aldus Huxley)

PERSEMBAHAN:

1. Ibu Siti Umi Hanik dan Bapak Taufiq Susiyo tercinta, yang selalu memberikan doa dan dukungan terhadap saya.
2. Adikku tercinta Muhammad Ilham Syahriyan serta semua saudara-saudaraku.
3. Para sahabat-sahabatku dan teman-teman kos Roemah Pelangi
4. Seluruh teman-teman seperjuanganku di Pendidikan Geografi 2011.
5. Almamaterku.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga skripsi dengan judul "Faktor-faktor yang mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada masyarakat pesisir di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang tahun 2015"dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi strata 1 (satu) guna meraih gelar Sarjana Pendidikan. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., RektorUniversitasNegeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimbailmu di UNNES.
2. Drs. Sholehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNNES, yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam perijinan penelitian.
3. Dr. Tjaturahono Budi Sanjoto, M.Si., Ketua Jurusan Geografi FIS UNNES dan sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi.
4. Drs. Hariyanto, M.Si., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi.
5. Drs. Moch. Arifien, M.Si., Dosen Penguji Utama yang telah memberikan masukan kritik dan saran selama proses sidang dan revisi skripsi.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

6. Eddy Kiswanto, S.H., M.Si., sebagai Camat Sarang Kabupaten Rembang yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
7. Kepala Desa Kalipang, Sendang Mulyo, Sarang meduro, Bajing Meduro, Bajing Jowo, Karangmangu, dan Temperak yang telah memberikan ijin penelitian.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat segala keterbatasan, kemampuan, dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang memerlukan.

Semarang, 2016

Penulis

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Hamzulida Rizqia Rahmatika. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Masyarakat Pesisir di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.* Skripsi. Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr.Tjaturahono Budi Sanjoto, M.Si., Pembimbing II: Drs. Hariyanto, M.Si., 92 halaman.

Kata kunci: Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Sekolah Menengah Pertama, Masyarakat pesisir

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada masing-masing desa pesisir di Kecamatan Sarang, (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada masyarakat pesisir di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

Lokasi penelitian di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, tepatnya di tujuh desa pesisir yaitu Desa Kalipang, Desa Sendang Mulyo, Desa Karangmangu, Desa Bajing Jowo, Desa Bajing Meduro, Desa Sarang Meduro, dan Desa Temperak. Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang tua yang mempunyai anak tidak melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama dan putus sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2014. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis Deskriptif Presentase (DP) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar jenjang Sekolah Menengah Pertama pada masyarakat pesisir di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Tujuh desa pesisir yang telah diteliti memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Sekolah Menengah Pertama yang rendah dikarenakan masih jauh dibawah rata-rata APK Nasional, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Sekolah Menengah Pertama desa pesisir Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang menjadi rendah bukan disebabkan karena kondisi sosial ekonomi orang tua dan aksesibilitas melainkan disebabkan oleh motivasi, hal ini disebabkan karena kondisi sosial ekonomi orang tua sudah tinggi dan aksesibilitas menuju Sekolah Menengah Pertama sudah baik, namun motivasi untuk bersekolah masih rendah.

Simpulan penelitian ini yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Sekolah Menengah Pertama di desa pesisir Kecamatan Sarang rendah. Faktor yang mempengaruhi rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Sekolah Menengah Pertama di desa pesisir Kecamatan Sarang yaitu motivasi. Saran dari penelitian ini adalah (1) pemerintah daerah hendaknya memberikan arahan atau sosialisasi terhadap masyarakat pesisir di Kecamatan Sarang tentang pentingnya

wajib belajar 9 tahun, supaya tidak ada lagi anak yang mengalami putus sekolah di jenjang pendidikan dasar. Sehingga dengan demikian Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kecamatan Sarang akan meningkat dan mencapai rata-rata APK Nasional, (2) orang tua hendaknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak di lingkungan tempat tinggalnya supaya anak tidak masuk dalam pergaulan teman yang salah. Selain itu anak juga harus selalu meningkatkan motivasi diri untuk tetap bersekolah.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN KELULUSAN iii

PERNYATAAN iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

PRAKATA vi

SARI viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 RumusanMasalah 6

1.3 TujuanPenelitian 6

1.4 ManfaatPenelitian 6

1.5 Penegasan Istilah 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Wajib Belajar 12

2.2 Partisipasi Pendidikan 14

2.2.1 Sosial Ekonomi 15

2.2.2 Aksesibilitas 20

2.2.3 Motivasi 24

2.3 Masyarakat Pesisir 27

2.4 Budaya Masyarakat Pesisir 28

2.5 Alur Penelitian 31

2.6 Penelitian Terdahulu 33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 36
3.2. Populasi dan Smpel 36
3.3. Variabel Penelitian 38
3.4. Metode Pengumpulan Data 40
3.5. Metode Analisis Data 42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 44
4.1.1 Letak Wilayah 44
4.1.2. Luas Wilayah 46
4.1.3. Kondisi Geografis 46
4.1.4. Penggunaan Lahan 46
4.1.5. Kependudukan 46
4.2 Hasil Penelitian 48
4.2.1 APK SMP Desa Pesisir 48
4.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi APK 49
4.2.2.1 Kondisi Sosial Ekonomi 49
4.2.2.2 Aksesibilitas 53
4.2.2.3 Motivasi 56
4.3 Pembahasan 58
4.3.1 APK SMP Desa Pesisir 58
4.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi APK 60
4.3.2.1 Kondisi Sosial Ekonomi 60
4.3.2.2 Aksesibilitas 64
4.3.2.3 Motivasi 65

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan 68
5.2 Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN 71

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1.1 APK dan APM Jenjang SMP Kabupaten Rembang Tahun 2014/2015 4
2.1 Penelitian Terdahulu 33
3.1 Kisi-Kisi Pengambilan Sampel 38
3.2 Kriteria Deskriptif Persentase 43
4.1 Jumlah Penduduk 46
4.2 Klasifikasi Pekerjaan Penduduk Desa Pesisir 47
4.3 APK SMP Desa Pesisir Kecamatan Sarang 48
4.4 Kondisi Sosial Ekonomi 49
4.5 Kondisi Sosial Ekonomi Per Desa 50
4.6 Tingkat Pendidikan Orang Tua 50
4.7 Pendapatan Orang Tua 51
4.8 Jumlah Beban Tanggungan Keluarga 51
4.9 Kepemilikan Jenis Kendaraan 52
4.10 Kondisi Rumah 52
4.11 Aksesibilitas 53
4.12 Jarak Tempuh Ke Sekolah Terdekat 54
4.13 Waktu Tempuh Ke Sekolah Terdekat 54
4.14 Biaya Transportasi 55
4.15 Kondisi Jalan 55
4.16 Kriteria Deskriptif Persentase Motivasi 56
4.17 Motivasi Internal dan Eksternal Per Desa 56
4.18 Motivasi Internal Global 57
4.19 Motivasi Eksternal Global 58

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

2.1 Kerangka Alur Penelitian 32
4.1 Peta Lokasi Penelitian..... 45

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Kisi-Kisi Instrumen 73
2. Instrumen Penelitian 77
3. Hasil Perhitungan APK..... 84
4. Hasil Penelitian Kondisi Sosial Ekonomi..... 85
5. Hasil Penelitian Aksesibilitas 86
6. Hasil Penelitian Motivasi..... 87
7. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kecamatan 89
8. Dokumentasi Penelitian 90

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan memegang peranan sentral dalam pembangunan bangsa dan negara, karena dari sanalah kecerdasan dan kemampuan bahkan watak bangsa di masa akan datang banyak ditentukan oleh pendidikan pada saat ini. Pendidikan berperan sebagai dasar dalam membentuk kualitas manusia yang mempunyai daya saing dan kemampuan dalam menyerap teknologi yang akan dapat meningkatkan produktifitas.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan pemerintah Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pengertian tersebut setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan yang berimbang akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila (Dikdasmen, 2009:57).

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara adalah beberapa indikasi yang sangat nyata sebagai upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia agar mampu bersaing dalam era keterbukaan dan globalisasi.

Wajib belajar telah menjadi prioritas kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 70-an. Sejak dikeluarkan Inpres No 10 Tahun 1973, pemerintah secara terencana meningkatkan pembangunan sarana pendidikan dasar. Pada tahun 1983, Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Wajib Belajar Enam Tahun untuk anak usia 7-12 tahun secara nasional. Sejalan dengan kesuksesan Program Belajar Enam Tahun, sejak Bulan Mei tahun 1994, Pemerintah Indonesia melanjutkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Meskipun Program Wajib Belajar Sembilan tahun sudah berjalan di Indonesia, tetapi masih terdapat persoalan pendidikan yangdihadapi bangsa Indonesia, seperti masih banyaknya angka putus sekolah dan angka tidak melanjutkan pada penduduk usia 7-15 tahun. Persoalan pendidikan tersebut salah satunya muncul di wilayah pesisir Indonesia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah merupakan ciri umum nelayan-nelayan tradisional di berbagai wilayah perairan Indonesia. Kesulitan-kesulitan ekonomi tidak memberikan kesempatan bagi rumah tangga nelayan meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak mereka. Banyak anak yang harus bekerja melaut setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar (Kusnadi, 2003:85).

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sebagian wilayahnya juga merupakan wilayah pesisir Indonesia. Jawa Tengah memiliki

jumlah nelayan terbanyak ke-dua setelah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Aceh berturut-turut menjadi provinsi dengan jumlah nelayan terbanyak ke-tiga, ke-empat, ke-lima, dan ke-enam di Indonesia. Sedangkan jumlah nelayan paling sedikit adalah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Maluku Utara (Survei Sosial Ekonomi Nasional 2013, BPS).Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlautkan) Jawa Tengah Muhamad Syafriadi mengatakan, jumlah nelayan di Jawa Tengahsebesar 158.899 orang. Rinciannya, pantai utara sebanyak 140.886 orang, dan pantai selatan 18.013 orang.

Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa, dengan luas wilayah sekitar 1.014 km2 dan memiliki panjang garis pantai 63,5 km. 35% dari luas wilayah kabupaten Rembang merupakan kawasan pesisir seluas 355,95 km2.Kabupaten Rembang terdiri dari 14 kecamatan yang enam diantaranya termasuk kecamatan yang terletak berbatasan langsung dengan Laut Jawa.

Berdasarkan survei sosial ekonomi nasional 2013 yang dilakukan oleh BPS, Para nelayan kurang beruntung ditinjau dari aspek pendidikan, dengan hampir 70% nelayan berpendidikan sekolah dasar ke bawah dan hanya sekitar 1,3% yang berpendidikan tinggi dan Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek kesehatan para nelayan.

Salah satu indikator keberhasilan dari Program Wajib Belajar 9 Tahun adalah pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) di semua jenjang pendidikan. Dalam hal ini peneliti mengkhususkan pada jenjang satuan pendidikan setingkat

SMP/MTs/Sederajat dengan pencapaian APK Nasional sebesar 99,47 % (Renstra Kemdikbud 2010-2014)

Tabel 1.1 APK dan APM jenjang SMP Kabupaten Rembang Tahun 2014/2015

No	Kecamatan	APK	APM	Lokasi
1.	Sumber	97,97	71,46	Non pesisir
2.	Bulu	82,74	57,35	Non pesisir
3.	Gunem	83,37	63,68	Non pesisir
4.	Sale	91,12	71,84	Non pesisir
5.	Sarang	82,93	64,60	Pesisir
6.	Sedan	90,06	68,37	Non pesisir
7.	Pamotan	112,06	87,39	Non pesisir
8.	Sulang	120,03	91,68	Non pesisir
9.	Kaliori	99,64	80,50	Pesisir
10.	Rembang	118,07	93,42	Pesisir
11.	Pancur	88,00	69,24	Non pesisir
12.	Kragan	95,40	70,31	Pesisir
13.	Sluke	95,75	78,52	Pesisir
14.	Lasem	112,71	88,41	Pesisir
Rata-Rata		97,84	75,48	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang

Berdasarkan data tersebut Kabupaten Rembang memiliki APK rata-rata sebesar 97,84 %. Itu artinya Kabupaten Rembang belum mampu mencapai target APK Nasional. Hal ini dipengaruhi oleh sebagian besar kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang masih berada di bawah APK Nasional sebesar 99,47 %. Dari 14 kecamatan hanya lima kecamatan yang sudah melebihi APK Nasional.

Kecamatan Sarang merupakan salah satu kecamatan yang APK-nya masih dibawah rata-rata APK Nasional. Kecamatan Sarang terletak di pesisir pantai Kabupaten Rembang yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Sarang memiliki jumlah penduduk sebesar 61.684 jiwa dengan jumlah nelayan 4.522 orang. Para nelayan di Kecamatan Sarang juga mengalami

permasalahan yang sama dengan nelayan Indonesia pada umumnya yaitu kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk mewakili indikator keberhasilan sektor pendidikan. Angka Partisipasi Murni (APM) sendiri tidak digunakan dalam penelitian ini karena terkadang akan terdapat kasus dimana terdapat siswa yang berusia lebih tua dari pada usia jenjang pendidikan tertentu yang di jalaninya, hal ini bisa terjadi karena orang tersebut tinggal kelas. Begitu juga sebaliknya akan di temui kasus dimana seseorang tersebut berusia lebih muda dibandingkan usia jenjang pendidikan yang dijalaninya, hal ini bisa di sebabkan oleh terlalu cepat masuk sekolah atau mendapat kelas akselerasi. Oleh karena itu Angka Partisipasi Kasar penulis menilai lebih tepat di gunakan untuk menunjukkan berapa besar tingkat partisipasi masyarakan secara umum disuatu tingkat pendidikan.

Kecamatan Sarang memiliki APK pada jenjang Sekolah Menengah Pertama yang paling rendah diantara kecamatan pesisir lainnya di Kabupaten Rembang, sehingga bisa dikatakan Kecamatan Sarang yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan itu memiliki tingkat partisipasi terhadap pendidikan yang sangat rendah.

Melihat kondisi obyektif diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Masyarakat Pesisir di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut.

1.2.1 Berapa Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada masing-masing desa pesisir di Kecamatan Sarang?

1.2.2 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada masyarakat pesisir di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang?

1.3. Tujuan

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.3.1 Mengetahui Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada masing-masing desa pesisir di Kecamatan Sarang.

1.3.2 Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada masyarakat pesisir di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1 Bagi peneliti, penelitian ini merupakansalah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan Geografi di Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.4.2 Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dan dasarpengambilan keputusan dengan bijaksana dalam perencanaan danpenetapan kebijakan bidang pendidikan yang menyangkut Program Wajib Belajar 9 Tahun.

1.4.3 Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang berguna bagi masyarakat di Kabupaten Rembang yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan program pendidikan di Kabupaten Rembang.

1.4.4 Bagi mahasiswa, sebagai tambahan informasi dan referensiuntuk penelitian lebih lanjut.

1.5. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah persepsi dan kesamaan konsep dalam mengartikan istilah maka perlu ditegaskan beberapa istilah sebagai berikut.

1.5.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar Adalah Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu (Badan Pusat Statistik). Pada penelitian ini APK yang digunakan adalah APK pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Rumus Perhitungan APK

$$APK = \frac{jumlah\ penduduk\ sekolah}{jumlah\ penduduk\ usia\ tertentu} \times 100\%$$

Keterangan :
Tingkat SD : Kelompok usia 7-12 tahun
Tingkat SMP : Kelompok usia 13-15 tahun
Tingkat SMA : Kelompok usia 16-18 tahun

1.5.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidian yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Terkait dalam penelitian ini yaitu APM SMP, sehingga proporsi jumlah penduduk yang bersekolahusia13-15 tahun terhadap jumlah seluruh penduduk yang berusia 13-15 tahun.

Rumus Perhitungan APM

$$APM = \frac{jumlah\ penduduk\ sekolah\ usia\ tertentu}{jumlah\ penduduk\ usia\ tertentu} \times 100\%$$

Keterangan :
Tingkat SD : Kelompok usia 7-12 tahun
Tingkat SMP : Kelompok usia 13-15 tahun
Tingkat SMA : Kelompok usia 16-18 tahun

1.5.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi APK

Menurut Poerwodarminto (1990:279), faktor diartikan sebagai suatu hal (keadaan atau peristiwa), yang ikut menimbulkan terjadinya sesuatu. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi APK adalah sebagai berikut.

1.5.3.1 Faktor Sosial Ekonomi

Sosial adalah segala sesuatu yang menyangkut masalah masyarakat (Poerwodarminto, 2002:961). Sedangkan ekonomi adalah urusan keuangan rumah tangga (Poerwodarminto, 2002:267). Sosial ekonomi menurut Abdulsyani (1994:86) adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam berorganisasi. Indikator kondisi sosial ekonomi

dalam penelitian ini adalah pekerjaan pokok, pekerjaan sampingan, tingkat pendidikan orang tua, tingkat pendapatan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, kondisi rumah, kepemilikan kendaraan pribadi.

1.5.3.2 Faktor aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan mudah atau tidaknya suatu daerah dihubungkan atau dijangkau dengan daerah lain dengan jaringan transportasi yang ada, berupa prasarana jalan dan alat angkut yang bergerak diatasnya. Dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu mudah tidaknya SMP/MTs yang ada di Kecamatan Sarang dijangkau dari lokasi-lokasi penelitian. Indikator dari aksesbilitas sendiri meliputi. Jarak tempuh, yaitu jarak yang ditempuh anak dari rumah ke sekolah.Waktu tempuh, yaitu waktu yang dibutuhkan anak untuk perjalanan dari rumah sampai ke sekolah. Biaya/ongkos transportasi, yaitu biaya yang dikeluarkan anak untuk menuju ke sekolah. Kondisi Jalan, yaitu kondisi sukar atau tidaknya jalan dilalui anak untuk menuju ke sekolah. Fasilitas Transportasi, yaitu fasilitas yang tersedia untuk melakukan perjalanan ke sekolah baik itu angkutan umum maupun kendaraan pribadi.

1.5.3.3 Faktor Motivasi

Motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul oleh adanya rangsangan-rangsangan dari dalam maupun dari luar sehingga seseorang berkeinginan untuk mengadakan perubahan tingkah laku/aktivitas tertentu lebih baik dari keadaan yang sebelumnya (Uno, 2011:9). Motivasi anak dalam penelitian ini adalah adanya dorongan untuk bersekolah, yaitu motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal antara lain adanya keinginan melanjutkan pendidikan,

Kebutuhan melanjutkan pendidikan, Harapan dan cita-cita. Motivasi eksternal antara lain adanya penghargaan dan penghormatan atas diri, Lingkungan (Keluarga dan masyarakat) dan budaya, adanya kegiatan yang menarik.

1.5.4 Pengertian Jenjang pendidikan

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan (Permendikbud No. 144 Tahun 2014 pasal 1). Pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1.5.5 MasyarakatPesisir

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang hidup atau tinggal di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Masyarakat pesisir juga sering disebut masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan adalah setiap orang yang penghidupanna baik sebagian atau keseluruhan didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut (Dinas Perikanan dan Kelautan, 1984:2).

1.5.6 Kecamatan Sarang

Kecamatan sarang adalah salah satu kecamatan pesisir di Kabupaten Rembang Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk sebesar 61.684 jiwa dengan mayoritas penduduknya adalah nelayan dan petani. Yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini adalah masyarakat pesisir.

Kecamatan Sarang merupakan kecamatan paling timur di Provinsi Jawa Tengah. Sebelah utara Kecamatan Sarang berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, sebelah barat berbatasan dengan

Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sedan, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sale dan Kecamatan Sedan.

Kecamatan Sarang terdiri dari 23 desa, antara lain Karangmangu, Kalipang, Nglojo, Lodan Wetan, Lodan Kulon, Tawang Rejo, Temperak, Sampung, Pelang, Sendang Mulyo, Sarang Meduro, Gunung Mulyo, Sumber Mulyo, Gonggang, Bajing Meduro, Bajing Jowo, Dadap Mulyo, Bonjor, Babak Tulung, Banowan, Baturno, Gilis, dan Jambangan. Dari 23 desa tersebut ada tujuh desa yang merupakan desa pesisir karena letaknya berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Ke tujuh desa tersebut adalah yang peneliti gunakan untuk lokasi penelitian, yaitu Desa Kalipang, Desa Sendang Mulyo, Desa Sarang Meduro, Desa Bajing Meduro, Desa Bajing Jowo, Desa Karangmangu, dan Desa Temperak.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Wajib Belajar

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagaman, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1). Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal di sekolah dan di luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar diemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat (Mudyahardjo, 2008:11).

Dalam rangka upaya pemerataan pendidikan, penuntasan wajib belajar untuk semua, menghapus kesenjangan jender dan meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah Indonesia telah mencanangkan wajib belajar dari 6 tahun (1984) menjadi 9 tahun (1994). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pasal 6 ayat (1) setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs), meskipun dalam bab VII pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia enam tahun dapat mengikuti program wajib belajar.

Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia; ayat (2) wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dalam upaya mempercepat tercapainya gerakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun, pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomer 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GN-PWB/PBA). Dalam Inpres tersebut tercantum target pencapaian yaitu; i) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI minimal 95 persen pada akhir tahun 2008, ii) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs minimal 95 persen pada akhir tahun 2009. Ketuntasan wajib belajar terbagi dalam empat kategori (Depdiknas, 2006).

1. Tuntas Pratama bila APK mencapai 80% - 84%
2. Tuntas Madya bila APK mencapai 85% - 89%

3. Tuntas Utama bila APK mencapai 90% - 94%

4. Tuntas Paripurna bila APK mencapai minimal 95%

2.2. Partisipasi Pendidikan

Masalah partisipasi pendidikan berkenaan dngan rasio atau perbandingan antara masukan pendidikan atau jumlah penduduk yang tertampung dalam satuan-satuan pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, dengan jumlah penduduk yang secara potensial sudah siap memasuki satuan-satuan pendidikan. Semakin besar kesenjangan antara jumlah penduduk yang menjadi peserta didik dengan jumlah penduduk yang seharusnya memperoleh pendidikan, semakin besar pula masalah partisipasi pendidikan.

2.2.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekoah SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarankan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

2.2.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidian

yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran misalnya APM SD adalah proporsi jumlah murid SD yang berusia 7-12 tahun terhadap jmlah seluruh anak yang berusia 7-12 tahun.

2.2.3. Angka Partisipasi Sekolah(APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pendidikan antara lain sosial ekonomi, aksesibilitas, dan motivasi.

2.2.1 Sosial Ekonomi

Pengertian Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan (Astrawan, 2014:3). Indikator kedudukan sosial ekonomi menurut Melly G. Tan adalah pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan. Berdasarkan ini masyarakat tersebut dapat digolongkan kedalam kedudukan sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi (Koentjaraningrat, 1981:35). Untuk menentukan stratifikasi sosial (dalam Nasution, 2004:26-27) dapat diikuti tiga metode yaitu sebagai berikut (1) metode obyektif, stratifikasi ditentukan

berdasarkan kriteria obyektif yaitu jumlah pendapatan, lama/tingginya pendidikan, dan jenis pekerjaan, (2) metode subyektif, golongan sosial dirumuskan menurut pandangan anggota masyarakat menilai dirinya dalam hiraerki kedudukan dalam masyarakat itu, (3) metode reputasi, metode ini dikembangkan oleh W. Lloyd Warner cs. Dalam metode ini golongan sosial dirumuskan menurut bagaimana anggota masyarakat menempatkan masing-masing dalam stratifikasi masyarakat itu

Sedangkan penelitian lain dalam (Nasution, 2004:28) menggunakan berbagai kriteria sosial ekonomi untuk membedakan berbagai golongan sosial, antara lain : (1) jabatan, (2) jumlah dan sumber pendapatan, (3) tingkat pendidikan, (4) agama, (5) jenis dan luas rumah, (6) lokasi rumah, (7) asal keturunan, (8) partisipasi dalam organisasi.

Abdulsyani (2002:86) berpendapat bahwa indikator yang menentukan stratifikasi sosial ekonomi adalah sebagai berikut (1) pemilikan atas kekayaan yang bernilai ekonomis dalam berbagai bentuk dan ukuran; artinya strata dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari nilai kekayaan seseorang dalam masyarakat, (2) status atas dasar fungsi dalam pekerjaan, misalnya sebagai dokter, dosen, buruh, atau pekerja teknis dan sebagainya; semua ini sangat menentukan status seseorang dalam masyarakat, (3) kesalehan seseorang dalam beragama; jika seseorang sungguh-sungguh penuh dengan ketulusan dalam menjalankan agamanya, maka status seseorang tadi akan dipandang lebih tinggi oleh masyarakat, (4) status atas dasar keturunan; artinya keturunan dari orang yang dianggap terhormat (ningrat) merupakan ciri seseorang yang memiliki status

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

tinggi dalam masyarakat, (5) latar belakang rasial dan lamanya seseorang atau sekelompok orang tinggal pada suatu tempat; Pada umumnya seseorang sebagai pendirian suatu kampung atau perguruan tertentu, biasanya dianggap masyarakat sebagai orang yang berstatus tinggi, terhormat, dan disegani, (6) status atas dasar jenis kelamin dan umur seseorang; pada umumnya seseorang yang lebih tua umurnya lebih dihormati dan dipandang tinggi statusnya dalam masyarakat. Begitu juga jenis kelamin, laki-laki pada umumnya dianggap lebih tinggi statusnya dalam keluarga dan dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian teori-teori diatas indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kondisi sosial ekonomi dalam penelitian ini antara lain.

2.2.1.1 Pekerjaan Pokok

Pekerjaan/mata pencaharian merupakan suatu aktifitas yang dikerjakan oleh seseorang sehingga dapat menghasilkan suatu pendapatan atau sumber penghidupan.

2.2.1.2 Pekerjaan Sampingan

Selain pekerjaan pokok seseorang juga bisa memiliki pekerjaan sampingan. Pekerjaan sampingan adalah suatu jenis usaha atau pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang di luar pekerjaan aslinya yang selama ini telah digeluti dan di kerjakan.

2.2.1.3 Tingkat Pendidikan Orang Tua

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagaman, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1).

Pendidikan formal yang pernah ditempuh orang tua akan berpengaruh pada kelanjutan sekoah anak mereka. Orang tua yang memiliki pendidikan yang tinggi akan mempunyai dorongan untuk memperbaiki hidupnya dan keluarganya, disamping itu akan memberikan pertimbangan yang rasional dalam menghadapi suatu masalah, yang berpengaruh terhadap pandangan dan wawasannya. Demikian juga dengan pendidikan anak mereka, orang tua akan mempunyai dorongan atau motivasi yang besar untuk menyekolahkan anak mereka (Kadarwati, 1995:12).

2.2.1.4 Tingkat Pendapatan Orang Tua

Menurut Sunardi dan Evers (dalam Rosandi, 2007:19) menyebutkan bahwa pendapatan adalah seluruh penerimaan baik dari pihak lain maupun dari hasil sendiri, dengan jalan dinilai dengan sejumlah uang atas harga barang yang berlaku saat itu. Pendapatan dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh seseorang dari pekerjaan yang dilakukan baik berupa uang maupun barang. Tingkat pendapatan menurut Sunardi dan Evers (dalam Rosandi, 2007:20) adalah "pendapatan yang diperoleh seseorang beserta anggota keluarga dari sektor formal, informal dan sektor sub sistem dalam waktu 1 bulan yang di ukur dengan rupiah.

Perbedaan sumber pendapatan juga mempengaruhi harapan orang tua tentang pendidikan anaknya. Orang tua yang berada mengharapkan pendidikan yang demikian tinggi (Nasution, 2009:31). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pendapatan yang diterima penduduk digolongkan berdasarkan 4 golongan yaitu:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

(1) golongan penduduk berpendapatan rendah, yaitu penduduk yang berpendapatan rata-rata <Rp.1.500.000 per bulan, (2) golongan penduduk berpendapatan sedang, yaitu penduduk yang berpendapatan rata-rata antara Rp.1.500.000-Rp.2.500.000 per bulan, (3) golongan penduduk berpendapatan tinggi, yaitu penduduk yang berpendapatan rata-rata antara Rp.2.500.000-Rp.3.500.000 per bulan, (4) golongan penduduk berpendapatan sangat tinggi, yaitu penduduk yang berpendapatan >Rp.3.500.000 per bulan.

2.2.1.5 Jumlah Tanggungan Orang Tua

Jumlah tanggungan adalah banyaknya orang yang menjadi tanggung jawab (secara materi) oleh orang tua. Semakin banyak jmlah tanggungan, maka semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Sumardi (1985 dalam skripsi Rina, 2011:22) jumlah tanggungan keluarga digolongkan menjadi 4 yaitu lebih dari 10 orang berarti sangat banyak tanggungan, 7 sampai 9 orang, berarti banyak tanggungan, 5 sampai 6 orang, berarti tanggungan sedang, 1 sampai 4 orang, berarti tanggungan sedikit.

2.2.1.6 Kondisi rumah

Menurut Kaare dalam Irawati (2004:12) untuk mengukur tingkat sosial ekonomi seseorang dapat dilihat dari rumah tempat tinggalnya, antara lain sebagai berikut: (1) status rumah yang bisa ditempati, bisa rumah sendiri, rumah dinas, menyewa, menumpang pada saudara atau ikut orang lain, (2) kondisi fisik bangunan dapat berupa rumah permanen, semi permanen, atau tidak permanen. Keluarga yang kondisi ekonominya tinggi pada umumnya kondisi fisik rumahnya permanen, sedangkan yang keadaan ekonominya menengah kebawah keadaan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

rumahnya semi permanen atau tidak permanen, (3) besarnya rumah yang ditempati, semakin luas rumah yang ditempati semakin tinggi pula tingkat sosial ekonominya.

2.2.1.7 Kepemilikan kendaraan pribadi

Kendaraan pribadi bisa digunakan sebagai parameter kondisi sosial ekonomi suatu keluarga. Dalam penelitian ini mengenai kendaraan pribadi bisa dilihat dari jenis kendaraan dan jumlah kendaraan. Selain itu karena fokus penelitian ada pada masyarakat pesisir, sehingga kepemilikan kapal juga digunakan sebagai parameter kondisi sosial ekonomi dalam penelitian ini.

2.2.2 Aksesibilitas

Aksesibilitas menurut Black dalam (Miro, 2005:18) merupakan konsep yang menggabungkan (mengkombinasikan) sistem tata guna lahan geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya, dimana perubahan tata guna lahan, yang menimbulkan zona-zona dan jarak geografis di suatu wilayah atau kota, akan mudah dihubungkan oleh penyediaan prasarana atau sarana angkutan.

Aksesibilitas menurut Tamin dalam (Miro, 2005:18) merupakan mudahnya suatu lokasi dihubungkan dengan lokasi lain lewat jaringan transportasi yang ada, berupa prasarana jalan dan alat angkut yang ada di atasnya. Dengan perkataan lain, suatu ukuran kemudahan dan kenyamanan mengenai cara lokasi petak (tata) guna lahan yang saling berpencar, dapat berinteraksi (berhubungan) satu sama lain. Dan mudah atau sulitnya lokasi-lokasi tersebut dicapai melalui sistem

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

jaringan trasportasinya, merupakan hal yang sangat subjektif, kualitatif, dan relatif sifatnya, artinya yang mudah bagi seseorang belum tentu, mudah bagi orang lain.

Salah satu variabel yang bisa dinyatakan apakah ukuran tingkat kemudahan pencapaian suatu tata guna lahan dikatakan tinggi atau rendah adalah jarak fisik dua tata guna lahan (dalam kilometer). Kalau kedua tata guna lahan mempunyai jarak yang brjauhan secara fisik, maka aksesnya dikatakan rendah. Demikian pula sebaliknya. Akan tetapi, faktor jarak ini tidak dapat sendirian saja digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat akses dua tata guna lahan. Menurut Tamin dalam (Miro, 2005:19) faktor jarak tidak dapat diandalkan, karena pada kenyataannya bisa terjadi bahwa dua zona yang jaraknya berdekatan (misalkan sejarak 1,5 km), tidak dapat dikatakan tinggi tingkat akses (pencapaiannya) apabila antara zona (guna lahan) yang satu dengan yang lainnya tidak terdapat prasarana jaringan transportasi yang menghubungkannya. Demikian pula sebaliknya, dua zona yang berjauhan pun tidak bisa disebut rendah tingkat pencapaiannya, kalau antara kedua zona tersebut terdapat prasarana jaringan jalan dan pelayanan armada angkutan yang cukup memadai.

Dengan pengetahuan bahwa faktor jarak bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan tinggi rendahnya akses (tingkat kemudahan pencapaian tujuan) seperti digambarkan diatas, maka faktor-faktor lain diluar jarak perlu kita pertimbangkan dalam menentukan tinggi rendahnya akses (Miro, 2005:20) faktor-faktor tersebut antara lain: (1) faktor waktu tempuh, faktor ini sangat ditentukan oleh ketersediaan prasarana transportasi yang dapat dihandalkan *(reliable transportation system)*. Contohnya adalah dukungan jaringan jalan yang

berkualitas, yang menghubungkan asal dengan tujuan, diikuti dengan terjaminnya armada angkutan yang siap melayani kapan saja, (2) faktor biaya/ongkos perjalanan, biaya perjalanan ikut berperan dalam menentukan mudah tidaknya tempat tujuan dicapai, karena ongkos perjalanan yang tidak terjangkau mengakibatkan orang (terutama kalangan ekonomi bawah) enggan atau bahkan tidak mau melakukan perjalanan, (3) faktor intensitas (kepadatan) guna lahan, padatnya kegiatan pada suatu petak lahan yang telah diisi dengan berbagai macam kegiatan, akan berpengaruh pada dekatnya jarak tempuh berbagai kegiatan tersebut, dan secara tidak langsung, hal tersebut ikut mempertinggi tingkat kemudahan pencapaian tujuan, (4) faktor pendapatan orang yang melakukan perjalanan, pada umunya orang mudah melakukan perjalanan kalau ia didukung oleh kondisi ekonomi yang mapan, walaupun jarak perjalanan secara fisik jauh.

Berdasarkan teori diatas parameter yang digunakan untuk mengukur aksesibilitas pada penelitian ini antara lain sebagai berikut.

2.2.2.1 Jarak tempuh

Jarak tempuh kaitannya dengan penelitian ini merupakan jarak yang harus ditempuh oleh siswa menuju ke sekolah yang diukur dari lokasi penelitian, dengan satuan kilometer (km). Jarak dari rumah ke sekolah yang jauh akan lebih membutuhkan waktu dan biaya yang lebih banyak daripada jarak dari rumah ke sekolah yang dekat.

2.2.2.2 Waktu tempuh

Kaitannya dengan penelitian ini merupakan lamanya waktu yang harus di tempuh oleh siswa menuju ke sekolah yang di ukur dari lokasi penelitian, dengan

satuan menit. Faktor ini sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana transportasi.cepat lamanya waktu yang dibutuhkan juga mempengaruhi anak untuk melakukan perjalanan ke sekolah.

2.2.2.3 Biaya Transportasi

Biaya transportasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan siswa untuk menuju ke sekolah dan untuk pulang dari sekolah ke rumah. Biaya yang tidak terjangkau mengakibatkan seorang anak enggan bahkan tidak mau melakukan perjalanan ke sekolah. Kondisi yang seperti ini biasanya terjadi pada orang-orang kalangan ekonomi yang rendah.

2.2.2.4 Kondisi Jalan

Jalan merupakan sarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang diperuntukan bagi lalulintas kendaraan maupun manusia. Pengertian jalan tidak terbatas pada jalan yang ada di permukaan tanah saja, akan tetapi termasuk jalan yang melintasi sungai, seperti jembatan. Kondisi jalan kaitannya dengan penelitian ini yaitu apakah jalan untuk menuju ke sekolah mudah atau sukar di lalui, baik menggunakan angkutan umum maupun kendaraan pribadi.

2.2.2.5 Fasilitas Transportasi

Transportasi dapat diartikan sebagai usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain ini objek tersebut lebih barmanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu (Miro, 2005:4). Fasilitas transportasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tersedianya sarana transportasi yang dapat digunakan untuk menuju ke sekolah, baik berupa kendaraan pribadi maupun angkutan umum.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.2.3 Motivasi

Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Motivasi juga dapat dikatakan sebagai perbedaan antara dapat melaksanakan dan mau melaksanakan. Motivasi lebih dekat pada mau melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Motivasi adalah kekuatan, baik dari dalam maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya (Uno, 2011:1).

Dari sudut sumber yang menimbulkannya, motif dibedakan dua macam, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik, timbulnya tidak memerlukan rangsangan dari luar karena memang telah ada dalam diri individu sendiri, yaitu sesuai atau sejalan dengan kebutuhannya. Sedangkan motif ekstrinsik timbul karena adanya rangsangan dari luar individu, misalnya dalam bidang pendidikan terdapat minat yang positif terhadap kegiatan pendidikan timbul karena melihat manfaatnya.

Uno (2011:10) menyimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang untuk mengadakan perubahan tingkah laku, yang mempunyai indikator sebagai berikut: (1) adanya hasrat dan keinginan untuk melakukan kegiatan, (2) adanya dorongan dan kebutuhan melakukan kegiatan, (3) adanya harapan dan cita-cita, (4) penghargaan dan penghormatan atas diri, (5) adanya lingkungan yang baik, dan (6) adanya kegiatan yang menarik.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Berdasarkan teori-teori motivasi diatas yang peneliti gunakan sebagai parameter untuk mengukur motivasi dalam penelitian ini antara lain:

2.2.3.1 Motivasi Internal

Motivasi internal merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Yang termasuk dalam motivasi internal antara lain sebagai berikut.

2.2.3.1.1 Keinginan melanjutkan pendidikan

Motivasi yang berasal dari dalam diri sangat berpengaruh terhadap tingkah laku individu. Salah satunya yaitu adanya keinginan untuk bersekolah. Sehingga apabila ada keinginan yang kuat maka seorang anak terus melanjutkan sekolahnya.

2.2.3.1.2 Kebutuhan melanjutkan pendidikan

Seorang anak apabila sudah merasa bahwa sekolah adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi maka seorang anak tersebut tidak akan berhenti untuk bersekolah.

2.2.3.1.3 Harapan dan cita-cita

Adanya harapan dan cita-cita yang dimiliki seorang anak sangat berpengaruh terhadap kelangsungannya untuk melanjutkan sekolah. Apabila seorang anak memiliki harapan dan cita-cita yang tinggi maka dia akan berusaha keras untuk mewujudkan cita-citanya tersebut salah satunya dengan bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

2.2.3.2 Motivasi Eksternal

Motivasi eksternal merupakan motivasi yang berasal dari luar. Yang termasuk dalam motivasi internal antara lain sebagai berikut.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.2.3.2.1Penghargaan dan penghormatan atas diri

Seorang anak akan termotivasi untuk melanjutkan sekolahnya apabila setiap hasil yang dicapainya mendapatkan penghormatan dan penghargaan.

2.2.3.2.2Lingkungan dan budaya

Tingkah laku seseorang kaitannya dengan pendidikan akan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosialnya. Apabila dalam lingkungan sosialnya seorang anak tidak melanjutkan sekolah sudah menjadi budaya maka kemungkinan besar dia akan terpengaruh untuk tidak melanjutkan sekolah.

2.2.3.2.3Adanya kegiatan yang menarik

Kegiatan menarik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya kegiatan diluar sekolah yang lebih menarik sehingga anak cenderung lebih memilih untuk melakukan kegiatan tersebut dibandingkan dengan bersekolah.

Untuk mengukur motivasi anak dapat menggunakan skala *Likert*, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Motivasi anak merupakan atribut psikologi, sehingga digunakan skala *Likert* untuk mengukurnya.Skala Likert memiliki 5 kategori kesetujuan dan memiliki skor 1-5.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Arikunto (2006:241) menyatakan bahwa “Ada kelemahan dengan lima alternatif yang ada ditengah (karena dirasa aman dan paling gampang serta hampir tidak berpikir). Berdasarkan alasan penggunaan skor skala tersebut, maka penggunaan skor skala dalam penelitian ini hanya menggunakan kisaran 1-4 pilihan skor. Karena pilihan jenjang yang terlalu banyak dapat mengaburkan

maksud yang diinginkan dan dapat memunulkan pada satu jawaban saja terutama Skor yang ditengah, sehingga sangat disarankan alternatif pilihannya hanya 4 saja.

2.3. Masyarakat Pesisir

Persebaran nelayan di Indonesia sendiri sebenarnya sangat luas. Hal itu disebabkan karena Indonesia adalah negara maritim yang mempunyai potensi kelautan yang cukup besar. Masyarakat yang hidup di daerah pesisir inilah yang kemudian lekat dengan sebutan kaum nelayan. Kehidupan masyarakat nelayan tidak terlepas dari adanya lapisan sosial. Mereka yang menempati lapisan sosial atas adalah para pemilik perahu dan pedagang ikan yang sukses, lapisan tengah ditempati oleh juragan laut atau pemimpin awak perahu, lapisan terbawah ditempati oleh nelayan buruh. Mereka yang menempati lapisan atas hanya sebagian kecil dari masyarakat nelayan, sedangkan sebagian besar masyarakat nelayan berada pada lapisan terbawah. Pelapisan sosial ekonomi ini mencerminkan bahwa penguasaan alat-alat produksi perianan, akses modal, adan akses pasar hanya menjadi milik sebagian kecil masyarakat, yaitu mereka yang berada pada lapisan atas (Kusnadi, 2003:6).

Berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan, nelayan diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut.

2.3.1 Nelayan Pemilik atau Juragan

Nelayan juragan atau yang lebih dikenal dengan sebutan juragan adalah pemilik kapal yang umumnya disewakan atau bagi hasil dengan nelayan buruh (Mulyadi, 2007:7).

2.3.2 Nelayan Buruh atau Pandega

Pandega adalah orang yang membantu dan melaksanakan tugas operasional menangkap ikan di laut. Pekerjaan tersebut dilakukan karena keterbatasan modal peralatan yang dimiliki. Pandega dalam mencari nafkah di laut dilakukan dengan cara menyewa kapal pada unit-unit yang dimiliki nelayan besar atau ikut menjadi awak kapal orang (Kusnadi, 2002:3).

2.3.3 Nelayan Perorangan

Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri untuk melakukan pencarian ikan dilaut, dan dalam pengoprasiannya tidak melibatkan orang lain (Mulyadi, 2007:7)

2.4. Budaya Masyarakat Pesisir

Dalam istilah antropologi-budaya perbedaan antara kebudayaan dan budaya itu tidak ada. Kata budaya hanya dipakai sebagai suatu singkatan dari kebudayaan dengan arti yang sama (Koentjaraningrat, 2000:101). Kebudayaan merupakan pandangan hidup dari sekelompok orang dalam bentuk perilaku, kepercayaan, nilai, dan simbol-simbol yang mereka terima tanpa sadar/tanpa dipikirkan, yang semuanya diwariskan melalui proses komunikasi dan peniruan dari satu generasi kepada generasi berikutnya (Liliweri, 2002:8).

Sebagai suatu kesatuan sosial, masyarakat nelayan hidup, tumbuh, dan berkembang di wilayah pesisir atau wilayah pantai. Dalam konstruksi sosial masyarakat di kawasan pesisir, masyarakat nelayan merupakan bagian dari konstruksi sosial tersebut, meskipun disadari bahwa tidak semua desa-desa di kawasan pesisir memiliki penduduk yang bermatapencaharian sebagai nelayan.

Walaupun demikian, di desa-desa pesisir yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan, petambak, atau pembudidaya perairan, kebudayaan nelayan berpengaruh besar terhadap terbentuknya identitas kebudayaan masyarakat pesisir secara keseluruhan.

Perspektif antropologis untuk memahami eksistensi suatu masyarakat bertitik tolak dan berorientasi pada hasil hubungan dialektika antara manusia, lingkungan, dan kebudayaannya. Karena itu, dalam beragam lingkungan yang melingkupi kehidupan manusia, satuan sosial yang terbentuk melalui proses demikian akan menampilkan karakteristik budaya yang berbeda-beda. Dengan demikian, sebagai upaya memahami masyarakat nelayan, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, berikut ini akan dideskripsikan beberapa aspek antropologis yang dipandang penting sebagai pembangun identitas kebudayaan masyarakat nelayan, seperti sistem gender, relasi patron-klien, pola-pola eksploitasi sumber daya perikanan, dan kepemimpinan sosial.

2.4.1. Sistem Gender

Sistem gender adalah sistem pembagian kerja secara seksual (*the division of laborby sex*) dalam masyarakat nelayan yang didasarkan pada persepsi kebudayaan yang ada. Sebagai produk budaya, sistem gender diwariskan secara sosial dari generasi ke generasi. Berdasarkan sistem gender masyarakat nelayan, pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan ”laut” merupakan ”ranah kaum laki-laki”, sedangkan wilayah ”darat” adalah ranah kerja ”kaum perempuan”.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.4.2. Relasi Patron-Klien

Prinsip-prinsip relasi patron-klien berlaku juga pada masyarakat nelayan. Unsur-unsursosial yang berpotensi sebagai patron adalah pedagang (ikan) berskala besar dankaya, nelayan pemilik (perahu) (*orenga*, Madura), juru mudi (juragan laut atau pemimpinawak perahu), dan orang kaya lainnya. Mereka yang berpotensi menjadi klien adalahnelayan buruh (*pandhiga*, Madura) dan warga pesisir yang kurang mampu sumberdayanya. Secara intensif, relasi patron-klien ini terjadi di dalam aktivitas pranata ekonomidan kehidupan sosial di kampung. Para patron ini memiliki status dan peranan sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat nelayan.

2.4.3. Pola-pola Eksploitasi Sumber Daya Perikanan

Dalam konteks hubungan eksploitasi sumber daya perikanan, masyarakat nelayan kita memerankan empat perilaku sebagai berikut: (1) mengeksploitasi terus-menerus sumber daya perikanan tanpa memahami batas-batasnya; (2) mengeksploitasi sumberdaya perikanan, disertai dengan merusak ekosistem pesisir dan laut, seperti menebangi hutan bakau serta mengambil terumbu karang dan pasir laut; (3) mengeksploitasi sumberdaya perikanan dengan cara-cara yang merusak (*destructive fishing*), seperti kelompok nelayan yang melakukan pemboman ikan, melarutkan potasium sianida, dan mengoperasikan jaring yang merusak lingkungan, seperti *trawl* atau *minitrawl*, serta (4) mengeksploitasi sumber daya perikanan dipadukan dengan tindakan konservasi, seperti nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan disertai dengan kebijakan pelestarian

terumbu karang, hutan bakau, dan mengoperasikan jaring yang ramah lingkungan (Kusnadi, 2009:126-127).

2.4.4. Kepemimpinan Sosial

Sebagai suatu kesatuan sosial-budaya, masyarakat nelayan memiliki ciri-ciri perilaku sosial yang dipengaruhi oleh karakteristik kondisi geografis dan matapencaharian penduduknya. Sebagian dari ciri-ciri perilaku sosial tersebut adalah sebagai berikut : (1) etos kerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemakmuran., (2) kompetitif dan mengandalkan kemampuan diri untuk mencapai keberhasilan, (3) apresiasi terhadap prestasi seseorang dan menghargai keahlian, (4) terbuka dan ekspresif, sehingga cenderung "kasar", (5) solidaritas sosial yang kuat dalam menghadapi ancaman bersama atau membantu sesama ketika menghadapi musibah, (6) kemampuan adaptasi dan bertahan hidup yang tinggi, (7) bergaya hidup "konsumtif ", (8) demonstratif dalam harta-benda (emas, perabotan rumah, kendaraan, bangunan rumah, dan sebagainya) sebagai manifestasi "keberhasilan hidup", (9) agamis, dengan sentimen keagamaan yang tinggi, (10) temperamental, khususnya jika terkait dengan "harga diri".

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.5. Alur Penelitian

Faktor-faktor penyebab rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada masyarakat pesisir di Kecamatan Sarang merupakan obyek yang akan diteliti. Upaya untuk mempermudah jalannya penelitian yaitu perlu disusun alur penelitian yang digunakan untuk pedoman penelitian. Secara skematis alur penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

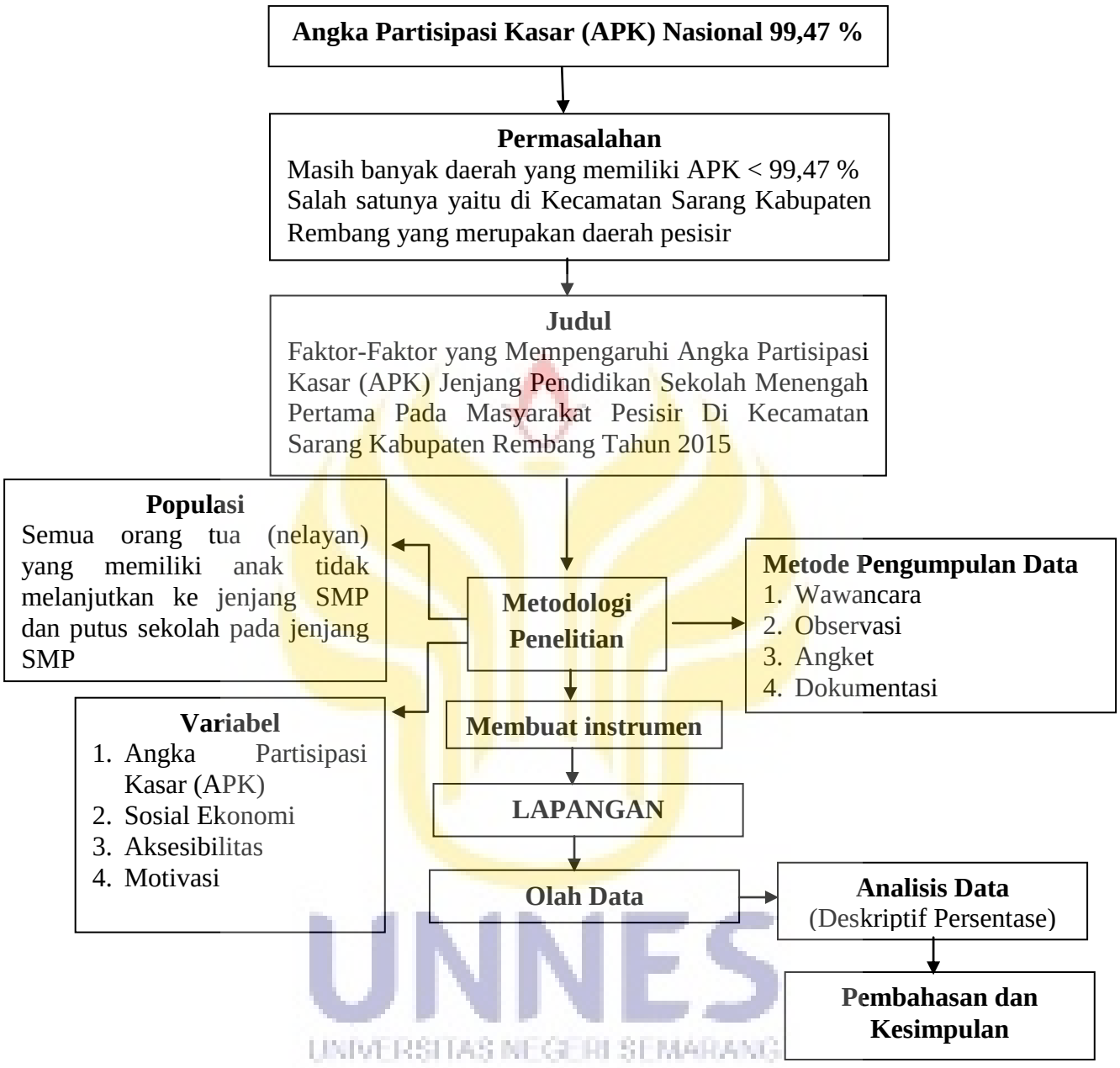

Gambar 2.1
Alur Penelitian

2.6. Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Tujuan	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Didi Prayitno (2008)	Analisis Rendahnya Partisipasi Masyarakat pada Implementasi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun (studi kasus di distrik Semangga Kabupaten Merauke)	1. Untuk mengetahui keterkaitan pandangan orangtua tentang nilai anak dengan partisipasi pada program wajib belajar 9 tahun. 2. Untuk mengetahui keterkaitan persepsi orangtua tentang pendidikan dengan partisipasi pada program wajib belajar 9 tahun. 3. Untuk mengetahui keterkaitan kondisi sosial ekonomi orangtua dengan partisipasi pada program wajib belajar 9 tahun. 4. Untuk mengidentisikasi faktor-faktor lain yang dianggap terkait dengan partisipasi masyarakat pada program Wajar 9 tahun.	1. Partisipasi orang tua 2. Pandangan orang tua 3. Persepsi orang tua 4. Kondisi sosial ekonomi	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam tentang partisipasi masyarakat pada program wajib belajar sembilan tahun di distrik Semangga.	1. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun masih rendah. 2. pandangan orang tua tentang nilai anak dalam program wajib belajar 9 tahun masih Sangat rendah. 3. persepsi orang tua tentang pendidikan dalam program wajib belajar 9 tahun masih Sangat rendah. 4. Kondisi sosial ekonomi masyarakat masih sangat rendah
2.	Dwi Jatmiko (2012)	Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Pendidikan Anak pada Keluarga Buruh Batik, Petani, dan Nelayan di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan	1. Mengetahui kondisi sosial ekonomi keluarga buruh batik, petani, dan nelayan di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. 2. Mengetahui tingkat pendidikan anak pada keluarga buruh batik, petani, dan nelayan di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. 3. Mengetahui pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat	Variabel bebas (X) : tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, pengeluaran keluarga, kekayaan yang dimilii, tingkat kesadaran orang tua terhadap pendidikan anaknya Variabel terikat (Y) : tingkat pendidikan anak	Penelitian ini menggunakan teknik sampel Combined Sampling , yaitu area Probability Sampling, Proportional Sampling, dan Random Sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi, observasi, dan angket.	1. Kondisi sosial ekonomi sedang - Petani: 55,00 % - Buruh batik : 46,67 % - Nelayan : 48,57 % 2. Tingkat pendidikan rendah - Petani : 60,00% - Buruh batik : 46,67% - Nelayan : 54,00% 3. Terdapat pengaruh yang signifikan - Petani : 93,7%

			buruh batik, petani, dan nelayan terhadap tingkat pendidikan anak.			- Buruh batik : 62,8% - Nelayan : 55,5%
3.	Rina (2011)	Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya APM (Angka Partisipasi Murni) pada Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung	Mengidentifikasi faktor- faktor geografis yang menyebabkan tidak tercapainya Angka Partisipasi Murni (APM) pada penduduk usia sekolah menengah pertama di Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung	1. faktor geografis, meliputi waktu tempuh, jarak tempuh, biaya, fasilitas transportasi, dan kondisi jalan 2. faktor sosial ekonomi, meliputi tingkat pendidikan orang tua, mata pencaharian orang tua, pendapatan, jumlah tanggungan orang tua, harapan orang tua terhadap pendidikan anak, dan jumlah SMP dan daya tampung SMP	Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa angket, observasi, dokumentasi. Sedangkan metode analisis data menggunakan deskriptif presentatif	1. faktor geografis - waktu tempuh : sangat rendah (29 %) - jarak tempuh : tinggi (63 %) - biaya : tinggi (66%) - fasilitas transportasi : rendah (47 %) - kondisi jalan : sangat rendah 2. faktor sosial ekonomi - tingkat pendidikan orang tua : tinggi (62 %) - mata pencaharian orang tua : sangat tinggi (95 %) - pendapatan : rendah (51,66%) - jumlah tanggungan : rendah (44 %) - harapan orang tua terhadap pendidikan anak : sangat tinggi (95 %) - jumlah dan daya tampung SMP : SMP N 1 Bejen tinggi (64%), SMP N 2 Bejen sangat rendah (11%), dan MTs Bejen sangat rendah (1%).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

4.	Nur Berlian V. A. (2011)	Faktor-faktor yang Terkait dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	1. Memperoleh informasi tentang daerah-daerah yang paling rendah dalam pencapaian Wajar Dikdas. 2. Mengkaji faktor-faktor yang terkait dengan rendahnya pencapaian Wajar Dikdas. 3. Merumuskan alternatif upaya pemecahan masalah penuntasan Wajar Dikdas	1. Kemiskinan 2. Aksesibilitas 3. Layanan pendidikan 4. Motivasi 5. Sosial budaya	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitif terhadap data sekunder dan dipadukan dengan pengumpulan data secara kualitatif melalui pengamatan lapangan dibeberapa daerah kasus.	1. Tingkat pencapaian Wajar Dikdas yang rendah didominasi oleh Kawasan Timur Indonesia (KTI), yaitu dimulai dari tingkat SD/MI, sedangkan di wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) permasalahannya lebih banyak di tingkat SMP/MTs. 2. faktor-faktor penyebab di setiap daerah cukup bervariasi yaitu kemiskinan penduduk, kesulitan menuju sekolah, kurangnya layanan pendidikan, rendahnya motivasi orangtua dan siswa terhadap pendidikan, kurangnya dukungan pemeritah daerah dan masyarakat terhadap pendidikan, dan faktor sosial budaya

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini. Selain itu objek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat pesisir.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di desa pesisir Kecamatan Sarang yaitu sebesar 66,92%, sehingga belum mencapai kriteria tuntas.

Faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar (APK) desa pesisir kecamatan Sarang, yaitu kondisi sosial ekonomi, aksesibilitas, dan motivasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) desa pesisir yaitu motivasi.

5.2 Saran

Pemerintah daerah hendaknya memberikan arahan atau sosialisasi terhadap masyarakat pesisir di Kecamatan Sarang tentang pentingnya wajib belajar 9 tahun, supaya tidak ada lagi anak yang mengalami putus sekolah di jenjang pendidikan dasar. Sehingga dengan demikian Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kecamatan Sarang akan meningkat dan mencapai rata-rata APK Nasional.

Orang tua hendaknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak di lingkungan tempat tinggalnya supaya anak tidak masuk dalam pergaulan teman yang salah. Selain ituanak juga harus selalu meningkatkan motivasi diri untuk tetap bersekolah.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani. 2002. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Ali, Mohamad. 2013. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa

Arikunto, S . 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Badan Pusat Statistika. 2012. *Statistik Pendidikan Jawa Tengah 2012*. Semarang: BPS Semarang

Badan Pusat Statistika. 2014. *Kabupaten Rembang Dalam Angka 2014*. Rembang: BPS Kabupaten Rembang.

Badan Pusat Statistika. 2014. *Kecamatan Sarang Dalam Angka 2014.* Rembang: BPS Kabupaten Rembang.

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. 2009. *Arah Pengembangan Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Djajasudarma, Fatimah T. 2006. *Metode Linguistik-Ancangan Metode Penelitian dan Kajian.* Bandung: Refika Aditama.

Ihsan, H.F. 2008. *Dasar-Dasar Kependidikan, komponen MKDK*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kadarwati. 1995. Tinjauan Geografi Terhadap Kemampuan Orang Tua Untuk Menyekolahkan Anak ke SLTP di Desa Teluk Wetan Kec. Welahan Kab. Jepara. *Skripsi*. IKIP Semarang.

Koentjaraningrat. 1981. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 2000. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kusnadi, M.A. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKiS.

_____. 2006. *Perempuan Pesisir*. Yogyakarta: LKiS.

_____. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Liliweri, Alo. 2002. *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: LKis

Miro, Fidel. 2005. *Perencanaan Transportasi*. Padang: Erlangga.

Muchlisoh, Sweeting. 1998. *Beberapa Penyebab Murid Mengulang Kelas, Putus Sekolah, dan Melanjutkan Sekolah dari SD ke SLTP*. Jakarta: CPCU

Mudyahardjo, R. 2008. *Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nasution S. 2004. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

_____. 2009. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Peter salim dan yeni salim. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern Press.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014 tentang Pendidikan Nasional. Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional diakses tanggal 14 Februari pukul 14.20 tersedia di https://atdikbudlondon.files.wordpress.com/2013/05/renstra_kemdikbud_2010-2014.pdf\

Rina. 2011. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tidak Tercapainya APM (Angka Partisipasi Murni) Pada Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama Di Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Tahun 2011. *Skripsi*. Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Rosandi, Fitria Yuli. 2007. Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Motivasi Orang Tua Menyekolahkan Anak Dari Jenjang SD ke SMP Dalam Pelaksanaan Pendidikan Dasar Di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2007. *Skripsi*. Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.

Tim Pemberdayaan Masyarakat Pesisir PSKP Jember. 2007. *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta.

Uno, B. Hamzah. 2011. Teori Motivasi dan Pengukurannya Analisis di Bidang Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG